



CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.

CSIS Commentaries DMRU-084-ID

26 June 2020

Menuju Situasi Normal Baru: Kesiapan Bali dalam Menangani COVID-19

Muhammad Habib Abiyan Dzakwan¹

Researcher, Disaster Management Research Unit, CSIS Indonesia
muhammad.habib@csis.or.id

Selama periode penyebaran pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) di Indonesia, Provinsi Bali relatif dianggap berhasil dalam manajemen penanganannya. Keberhasilan ini menarik perhatian banyak pihak mengingat hal ini terjadi tanpa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berbagai apresiasi disampaikan, di antaranya oleh Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi kemungkinan Bali menjadi daerah percontohan,² ataupun oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang mencatat upaya maksimal seluruh komponen di Bali.³

¹ Penulis hendak memberikan apresiasi terhadap rekan Mia Marina yang membantu memberikan arahan terhadap tulisan ini sekaligus memberikan informasi tambahan yang relevan

² "Tekan Corona Tanpa PSBB, Jokowi Jadikan Bali Percontohan," *Liputan 6*, 12 Mei 2020, <https://www.liputan6.com/regional/read/4252386/tekan-corona-tanpa-psbb-jokowi-jadikan-bali-percontohan>

³ "Doni Monardo Akui Bali Bisa Tekan Virus Korona Tanpa PSBB," *Media Indonesia*, 12 Mei 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/312398-doni-monardo-akui-bali-bisa-tekan-virus-korona-tanpa-psbb.html>

Wilayah ini diharapkan menjadi provinsi pertama yang mengakhiri COVID-19,⁴ dan bahkan telah ditetapkan sebagai daerah percobaan program tatanan normal baru dari Kementerian Pariwisata, yaitu implementasi aspek Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan (CHS).⁵ Tulisan ini mencoba mengidentifikasi sampai sejauh mana modalitas Bali dalam penanganan COVID-19 saat ini dapat mendukung tatanan normal baru yang efektif setelahnya. Setidaknya terdapat empat modalitas yang dimiliki provinsi Bali di antaranya termasuk kearifan lokal, strategi kesehatan masyarakat yang relatif gesit, kepemimpinan yang responsif dan terkoordinasi, serta fleksibilitas kemitraan lembaga usaha, pemerintah dalam rangka mendorong ketahanan masyarakat.

Perkembangan Terakhir COVID-19 Provinsi Bali

Bali saat ini memang belum terbebas dari pandemi COVID-19. Provinsi ini bahkan masih berada pada jajaran 22 daerah dengan penyebaran yang relatif cepat berdasarkan definisi tingkat reproduksi virus⁶ (Rt) — di atas 1. Bali sendiri memiliki angka Rt sekitar 1,34 yang berarti satu pasien terinfeksi dapat menimbulkan lebih dari satu infeksi baru.⁷ Namun demikian, situasi tersebut tampak cukup terkendali sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 1.1. Bali menunjukkan angka kesembuhan dari COVID-19 yang relatif tinggi sejak awal penyebarannya, yaitu sekitar 63,4 persen dari total kasus yang dilaporkan atau jauh lebih tinggi daripada angka kesembuhan di tingkat nasional. Bali juga dapat mengendalikan jumlah angka kematian akibat COVID-19 yang hingga saat ini masih berada di bawah 1 persen dari total kasus, atau sangat jauh dibandingkan persentase kematian di tingkat nasional yang mencapai lima kali lipat. Sekalipun masih terdapat penambahan kasus positif per harinya, namun kontribusinya terhadap angka di tingkat nasional relatif kecil atau berada di sekitar 1 persen.

Tabel 1.1.

Perbandingan Data Provinsi Bali dan Nasional per 9 Juni 2020

	Data Provinsi Bali ⁸	Data Nasional ⁹
<i>Pertambahan Kasus Positif dari hari sebelumnya</i>	12 Kasus	847 Kasus
<i>Total Kasus per 9 Juni 2020</i>	594 Kasus	32,033 Kasus
<i>Pertambahan Pasien Sembuh dari hari sebelumnya</i>	4 Orang	406 Orang
<i>Total Pasien Sembuh per 9 Juni 2020</i>	377 Orang (63.4%)	10,904 Orang (34%)
<i>Pertambahan Pasien Meninggal dari hari sebelumnya</i>	-	32 Orang
<i>Total Pasien Meninggal per 9 Juni 2020</i>	5 Orang (0,84%)	1,883 Orang (5,9%)

⁴ “Menteri Luhut Berharap Bali Provinsi Pertama Akhiri Pandemi COVID-19,” 5 Mei 2020, Berita Bali, <https://www.news.beritabali.com/read/2020/05/05/202005050006/menteri-luhut-berharap-bali-provinsi-pertama-akhiri-pandemi-covid-19>

⁵ “Bali Siap Dibuka, Nusa Dua Jadi Percontohan New Normal?,” CNBC Indonesia, 27 Mei 2020,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200527151631-4-161258/bali-siap-dibuka-nusa-dua-jadi-percontohan-new-normal>

⁶ Tingkat Reproduksi Virus menjelaskan pendataan bagaimana tingkat kecepatan penyebaran virus terjadi dalam kurun waktu tertentu yang seringkali dipantau secara aktual (*real-time*).

⁷ “Tracking the COVID-19 Spread: Monitoring the Effective Reproduction Number,” The Bonza, 9 Juni 2020, <https://www.thebonza.com/dashboard>

⁸ “Data Sebaran Kasus COVID-19 Sampai Dengan Tanggal 2020-06-08 di Bali,” Pemerintah Provinsi Bali, diakses 9 Juni 2020, <https://pendataan.baliprov.go.id/>

⁹ “Peta Sebaran,” Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, diakses 9 Juni 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali juga terkendali secara geografis. Dari sembilan kota/kabupaten di provinsi ini, penyebaran dilaporkan oleh pemerintah provinsi Bali mayoritas terjadi di empat wilayah yaitu Denpasar dengan persentase 22,89 persen atau sekitar 136 kasus, diikuti oleh Buleleng dengan persentase 17 persen atau sekitar 101 kasus, Bangli 16,49 persen atau sekitar 98 kasus, serta Badung 12,1 persen atau sekitar 72 kasus. Sementara itu, di wilayah lain dilaporkan hanya terdapat 20-40 kasus positif.

Kearifan Lokal sebagai Fondasi Penanganan COVID-19

Salah satu alasan penting yang menjelaskan relatif terkendalinya penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali adalah kontribusi kearifan lokal masyarakat setempat yaitu desa adat dan polisi adat (pecalang). Sejak awal munculnya pandemi ini, pemerintah provinsi Bali tercatat telah bekerja sama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang 'Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali'.¹⁰ Keputusan tersebut secara umum memberikan landasan hukum bagi keterlibatan dan tanggung jawab bagi 1.493 desa adat¹¹ selama periode pandemi COVID-19. Di antaranya, desa adat ditugaskan untuk berfokus pada kegiatan seputar kesehatan masyarakat, sosial dan ekonomi, serta spiritual (*niskala*) bekerja sama dengan Parisada Hindhu Dharma Bali.

Keterlibatan desa adat dalam penanganan COVID-19 kemudian juga setidaknya dijabarkan dengan tiga ketentuan hukum tambahan terkait. Pertama, Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali. Berdasarkan instruksi ini, desa adat diharapkan lebih banyak berperan dalam hal pengendalian kegiatan belajar, bekerja, beribadah, tradisi adat, keramaian wisata dan hiburan, perjalanan, sementara tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.¹² Kedua, Instruksi Gubernur Bali Nomor 412.2/2018/PPDA/PMA tentang Pendataan Pekerja Migran Indonesia/Anak Buah Kapal dan Krama di Desa Adat.¹³

Berdasarkan instruksi ini, desa adat secara spesifik diminta untuk melakukan upaya epidemiologis melalui pelacakan kontak (*contact tracing*) terhadap potensi kasus COVID-19 sebagai konsekuensi kembalinya pekerja migran ke Bali. Ketiga, Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang 'Paket Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali'. Dalam peraturan ini, desa adat diberikan penjelasan khusus pada Pasal 7 terkait penanganan kesehatan, sementara juga terlibat pada Pasal 10 terkait penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).¹⁴ Pemerintah provinsi Bali menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap pendataan masyarakat miskin yang berbasis pada desa adat untuk diberikan bantuan pangan non-tunai.

Tidak hanya kuat dari segi regulasi, kearifan lokal kemudian juga terlihat dari segi implementasi di lapangan. Pertama, dalam hal sosialisasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana satuan tugas Desa Adat Yeh Gangga Tabanan menggunakan pakaian Rahwana, Hanoman, Sangut serta Seka Kecak

¹⁰ "Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali," JDIH Provinsi Bali, 28 Maret 2020, <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/kepber-gubernur-bali-dan-mdaprovinci-bali/25116>

¹¹ "Tanpa PSBB, Bali Andalkan Desa Adat Atasi Corona," CNN Indonesia, 12 Mei 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512165422-20-502610/tanpa-psbb-bali-andalkan-desadadat-atasi-corona>

¹² "Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali," JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 1 April 2020, <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/ingub/25123>

¹³ "Efektifkan Pencegahan dan Penanganan COVID-19, Gubernur Instruksikan Pendataan Berbasis Desa Adat," Pemerintah Provinsi Bali, 26 April 2020, <https://www.baliprov.go.id/web/efektifkan-pencegahan-dan-penanganan-COVID-19-gubernur-instruksikan-pendataan-berbasis-desadadat/>

¹⁴ "Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali," JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 29 April 2020, <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pegrub/26834>

untuk mengingatkan masyarakat yang berlalu lalang tentang bagaimana pola hidup bersih dan sehat.¹⁵ Contoh lainnya adalah bagaimana satuan tugas Desa Adat Buleleng juga turut berinisiatif membantu pemerintah melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 terhadap pedagang pasar Anyar yang berlokasi di sekitar mereka.¹⁶

Kedua, dalam hal pengendalian mobilitas masyarakat. Salah satu contohnya adalah Desa Adat Renon Denpasar yang merumuskan peraturan adat bahwa apabila tidak menggunakan masker maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah tersebut.¹⁷ Pada kasus Desa Adat Piling Tabanan, bahkan setiap tamu akan diwajibkan mengisi data —nama, asal, dan keperluan— terlebih dahulu di pintu masuk dalam rangka membatasi tamu tanpa keperluan yang mendesak.¹⁸ Desa Adat juga relatif berinisiatif dalam upaya kesehatan mencegah COVID-19. Di antaranya adalah Desa Adat Sesetan Selatan Denpasar yang membentuk tim pemeriksa khusus untuk memetakan langsung kondisi kesehatan setiap penduduk di rumahnya masing-masing dalam rangka mengidentifikasi warga yang potensial COVID-19.¹⁹

Lainnya, Desa Adat Ubung Denpasar juga melakukan pendataan rutin terhadap tempat tinggal sementara ataupun kos-kosan dalam rangka mengidentifikasi apakah ada penghuni baru dari zona merah.²⁰ Desa Adat juga memiliki peranan penting dalam penanganan konsekuensi sosial-ekonomi akibat COVID-19. Sebagai contoh Desa Adat Sukawati Gianyar yang berinisiatif menggunakan anggaran dana sosial dan lembaga perkreditan desa adat untuk mendistribusikan bantuan sembako kepada warga setempat.²¹ Desa Adat Batumulapan Klungkung juga memanfaatkan dana kas desa adat bekerja sama dengan unit usaha desa adat (*Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*) membagikan sembako gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di Pulau Nusa Penida tersebut.²²

Hal yang menjadi menarik juga adalah kearifan lokal pun turut dimasukkan dalam sanksi bagi siapa pun yang melanggar kewajiban aturan kesehatan desa adat. Sebagai contoh yaitu Desa Adat Nyuh Kuning Gianyar menghukum warga yang tidak menggunakan masker dengan cara menyapu di lingkungan desa setempat.²³ Desa Adat Jimbaran memberlakukan sanksi adat yang lebih berat untuk pelanggar— selain diminta untuk membersihkan lingkungan desa hingga tiga jam selama tiga hari berturut-turut, pelanggar juga akan diwajibkan memakai kalung yang dituliskan ‘Melanggar Instruksi Bendesa Adat Jimbaran tentang COVID-19’.²⁴ Desa Gelgel Klungkung menghukum pelanggar

¹⁵ “Di Yeh Gangga, Satgas Gotong Royong Pakai Ini Saat Imbau Warga,” Denpasar Post, 18 Mei 2020, <https://www.denpost.id/news/2020/05/18/222500/di-yeh-gangga-satgas-gotong-royong-pakai-ini-saat-imbau-warga.html>

¹⁶ “Di Desa Adat Buleleng, Masih Banyak Pedagang Pasar Langgar Jam Operasional,” Bali Post, 4 Mei 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/05/04/119565/Di-Desa-Adat-Buleleng,Masih...html>

¹⁷ “Keluarkan Perarem, Desa Adat Renon Wajibkan Penggunaan Masker,” Bali Post, 19 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/19/116336/Keluarkan-Perarem,Desa-Adat-Renon...html>

¹⁸ “Diperketat, Pengawasan Perbatasan Desa Adat Piling,” Bali Post, 13 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/13/115127/Diperketat,Pengawasan-Perbatasan-Desa-Adat...html>

¹⁹ “Cek Kesehatan Warga, Ini Langkah Desa Adat Sesetan,” Bali Post, 10 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/10/114696/Cek-Kesehatan-Warga,Ini-Langkah...html>

²⁰ “Desa Adat dan Kelurahan Ubung Memonitor Penduduk Non-Permanen,” Bali Post, 7 Juni 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/06/07/127871/Desa-Adat-dan-Kelurahan-Ubung...html>

²¹ “Dukung Warga Sosial Distancing, Desa Adat Sukawati Bagikan Ribuan Sembako,” Bali Post, 16 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/16/115874/Dukung-Warga-Sosial-Distancing,Desa-Adat...html>

²² “Hadapi Dampak COVID-19, Desa Adat Batumulapan Bagi Sembako Gratis,” Bali Post, 12 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/12/115054/Hadapi-Dampak-COVID-19,Desa-Adat...html>

²³ “Sanksi Menyapu di Areal Desa Nyuh Kuning Bila Tanpa Masker,” Bali Post, 24 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/24/117413/Sanksi-Menyapu-di-Areal-Desa...html>

²⁴ “Putus Mata Rantai Penyebaran COVID-19, Desa Adat Jimbaran Terapkan Sanksi,” Bali Post, 10 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/10/114721/Putus-Mata-Rantai-Penyebaran-COVID-19,...html>

kewajiban isolasi mandiri dengan denda sebesar 100 ribu rupiah dan mengatur persembahan (*ngaturang pejati*) kepada desa adat.²⁵

Efektivitas penerapan sanksi ini tentunya tidak terpisahkan dari adanya infrastruktur tersendiri—polisi adat (*pecalang*) sebagai garda terdepan penegakkan hukum adat. Salah satu contohnya adalah bagaimana pecalang dari Desa Adat Kuta Badung selalu rutin berpatroli di kawasan Pantai Kuta guna memastikan tidak ada kerumunan selama pandemi ini.²⁶ Pecalang juga terlibat melakukan inspeksi mendadak terhadap ketertiban jam malam dan penggunaan masker seperti kasus Desa Adat Kota Tabanan,²⁷ pengawasan orang tanpa gejala semasa karantina mandiri seperti kasus Desa Adat Intaran Denpasar,²⁸ melakukan pengecekan suhu tubuh dan masker, serta menjaga keamanan seperti kasus Desa Adat Keramas Gianyar.²⁹ Pecalang merupakan aset desa adat yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum dan tim kesehatan mempercepat penanganan COVID-19.

Strategi Kesehatan Masyarakat yang Gesit

Kunci penting berikutnya adalah strategi kesehatan masyarakat secara gesit. Provinsi Bali menyadari bahwa kasus positif di wilayah ini hingga akhir Mei 2020 mayoritas didominasi oleh kasus impor.³⁰ Oleh karena itu, strategi kesehatan masyarakat yang dijalankan antara lain berfokus pada tiga hal yaitu pengetatan akses masuk, pembatasan pergerakan dalam periode inkubasi, serta mengidentifikasi sebanyak-banyaknya dan sedini mungkin terhadap pasien potensial.

Sejak pertama kali dapat melakukan tes cepat mandiri per 26 Maret 2020,³¹ Bali kemudian mulai awal April menerapkan skenario pengaturan akses masuk. Salah satunya dengan mewajibkan tes cepat bagi seluruh pendatang dari jalur laut via pelabuhan Gilimanuk,³² dan pendatang dengan riwayat perjalanan luar negeri ataupun dari zona merah di Indonesia yang masuk melalui jalur udara via bandara I Gusti Ngurah Rai.³³ Kebijakan ini kemudian diperkuat satu bulan berikutnya di mana seluruh penumpang penerbangan domestik tujuan Bali wajib telah melakukan tes cepat COVID-19,³⁴ dan bagi warga dengan riwayat perjalanan luar negeri diwajibkan untuk melakukan tes *swab* setibanya di Bandara Bali.³⁵

Pada akhir Mei 2020, pemerintah provinsi Bali sempat memperkuat kembali persyaratan tersebut dengan menambah prasyarat bahwa seluruh penumpang pesawat tujuan Bali sudah harus memiliki

²⁵ “Ini, Denda Bagi Warga Desa Adat Gelgel Yang Langgar Isolasi Mandiri,” Bali Post, 6 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/06/113909/Ini,Denda-Bagi-Warga-Desa...html>

²⁶ “Pastikan Tak Ada Kerumunan Massa di Kuta, Ini Dilakukan Desa Adat,” Bali Post, 22 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/22/116924/Pastikan-Tak-Ada-Kerumunan-Massa...html>

²⁷ “Puluhan Orang Terjaring Tak Pakai Masker, Ini Sanksinya,” Bali Post, 5 Juni 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/06/05/127467/Puluhan-Orang-Terjaring-Tak-Pakai...html>

²⁸ “Diketahui Masih Beraktivitas, 3 OTG di Sanur Kauh Dijemput Jalani Karantina,” Bali Post, 2 Mei 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/05/02/119134/Diketahui-Masih-Beraktivitas,3-OTG...html>

²⁹ “Operasi Jaga Baya, Wajib Masker Hingga Cek Suhu Tubuh Setiap Orang Masuk Desa Keramas,” Bali Post, 22 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/22/117005/Operasi-Jaga-Baya,Wajib-Masker...html>

³⁰ “Update Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali,” Pemerintah Provinsi Bali, 31 Mei 2020, <https://infocorona.baliprov.go.id/2020/05/31/update-penanggulangan-COVID-19-di-provinsi-bali-minggu-31-mei-2020/>

³¹ “Rapid Test COVID-19 di Bali Mulai 26 Maret, Ini yang Diprioritaskan,” Bali Post, 24 Maret 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/03/24/111737/Rapid-Test-COVID-19-di-Bali...html>

³² “Pemprov Bali Lakukan Rapid Test Semua Pendatang yang Masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk,” Tribun Bali, 4 April 2020, <https://bali.tribunnews.com/2020/04/04/pemprov-bali-lakukan-rapid-test-semua-pendatang-yang-masuk-bali-melalui-pelabuhan-gilimanuk?page=2>

³³ “Wabah Corona Mengganas Pintu Masuk Bandara Bali Dijaga Ketat,” Gatra, 17 April 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/475882/kebencanaan/wabah-corona-mengganas-pintu-masuk-bandara-bali-dijaga-ketat>

³⁴ “Penumpang Transportasi Selama Masa Mudik Wajib Rapid Test,” Bali Post, 8 Mei 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/05/08/120541/Penumpang-Transportasi-Selama-Masa-Mudik...html>

³⁵ “Tanpa Melalui Tes Rapid, PMI yang Datang Wajib Jalani Tes *Swab* Dua Kali,” Tribun Bali, 11 Mei 2020, <https://bali.tribunnews.com/2020/05/11/tanpa-melalui-tes-rapid-pmi-yang-datang-wajib-jalani-tes-swab-dua-kali>

hasil *swab* negatif selambat-lambatnya tujuh hari saat ketibaan.³⁶ Kebijakan ini kemudian mengalami penyesuaian per 3 Juni 2020 mempertimbangkan daerah lain di Indonesia yang tidak memiliki kapasitas dalam melakukan uji *swab*.³⁷ Oleh karenanya, penumpang dari daerah tersebut tetap akan diizinkan masuk selama yang bersangkutan bersedia untuk menjalani tes *swab* di Bali atas biaya sendiri serta mengikuti kewajiban karantina.

Tidak hanya pengaturan akses masuk, Bali juga menerapkan skenario pembatasan pergerakan pendatang dalam periode inkubasi. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Bali memberlakukan karantina terpusat bagi siapa pun yang masuk ke Bali mulai pertengahan April 2020.³⁸ Kebijakan karantina ini merespons banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi ketika karantina mandiri dan dalam rangka pencegahan transmisi lokal. Pemerintah Provinsi Bali saat itu merumuskan kebijakan memperhatikan hasil tes cepat bagi setiap pendatang. Dilaporkan bahwa apabila hasil tes cepat tersebut bersifat reaktif ataupun terbukti positif berdasarkan tes *swab*, maka karantinanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun apabila hasil tes cepat menunjukkan non-reaktif, maka kewajiban melakukan karantina dan pemeriksaan kesehatan akan dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.³⁹ Skema karantina ini dilengkapi dengan pemetaan digital terkait data setiap pendatang,⁴⁰ dan diberlakukan pula pendataan ulang bagi pendatang yang tiba sebelum akhir Maret 2020.⁴¹

Pembatasan pergerakan pada periode inkubasi juga diberlakukan pada wilayah yang ditemukan terjadi transmisi lokal akibat masuknya pekerja migran tanpa gejala. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam bentuk karantina wilayah selama empat belas hari. Setidaknya terdapat tiga desa yang sebelumnya sudah menjalani isolasi wilayah atas arahan pemerintah provinsi Bali di antaranya adalah Desa Abuan di Kabupaten Bangli, Desa Bondalem di Kabupaten Buleleng, dan Desa Padangkerta di Kabupaten Karangasem.⁴²

Sebagai daerah dengan tingkat transmisi lokal tertinggi juga, kota Denpasar telah menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sejak pertengahan Mei 2020. Perbedaan yang paling mendasar antara PSBB yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dengan PKM kota Denpasar sesuai Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 antara lain adalah sifatnya yang lebih kontekstual memperhatikan dinamika di daerah termasuk melibatkan desa adat dalam penanganan bertajuk pola '*Jaga Baya*' (pasal 14), memperhatikan pula kondisi warga negara asing dan ekspatriat (pasal 5), mengatur bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat (pasal 17), membahas mengenai sanksi administratif bagi pelanggar (pasal 19), pengaturan mengenai sumber pendanaan (pasal 20), mendorong kewajiban untuk melakukan tes cepat bagi industri yang masih terus

³⁶ "Uji *Swab*/PCR Wajib Bagi Penumpang Pesawat yang Masuk Bali," Pemerintah Provinsi Bali, 20 Mei 2020, <https://www.baliprov.go.id/web/uji-swab-pcr-wajib-bagi-penumpang-pesawat-yang-masuk-bali/>

³⁷ "Update Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali — Rabu, 3 Juni 2020," Gugus Tugas Percepatan Penanganan Provinsi Bali, 3 Juni 2020, <https://infocorona.baliprov.go.id/2020/06/03/update-penanggulangan-COVID-19-di-provinsi-bali-rabu-3-juni-2020/>

³⁸ "Update Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali — Kamis 16 April 2020," Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, 16 April 2020, <https://infocorona.baliprov.go.id/2020/04/16/update-penanggulangan-COVID-19-di-provinsi-bali-kamis-16-april-2020/>; Lihat juga Update pada tanggal 25 April 2020;

³⁹ "Semua Orang Masuk Bali akan dikarantina Pemerintah, Ini Skemanya," Bali Express, 14 April 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/14/188818/semua-orang-masuk-bali-akan-dikarantina-pemerintah-ini-skemanya>

⁴⁰ "Gubernur Bali Sebut Pengecekan PMI ABK Sangat Ketat," Antara, 12 Mei 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1486752/gubernur-bali-sebut-engecekan-pmi-abk-dilakukan-secara-ketat>

⁴¹ "TKI yang tiba di Bali Sebelum 22 Maret 2020 Didata Ulang untuk Rapid Test," Detik, 18 Mei 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5019885/tki-yang-tiba-di-bali-sebelum-22-maret-2020-didata-ulang-untuk-rapid-test/2>

⁴² "Pulau Dewata Pilih Gandeng Kearifan Lokal Ketimbang PSBB untuk Tekan Penyebaran Virus COVID-19," Nusa Daily, 13 Mei 2020, <https://nusadaily.com/nusantara/pulau-dewata-pilih-gandeng-kearifan-lokal-ketimbang-psbb-untuk-tekan-penyebaran-virus-COVID-19.html/3>

beroperasi (pasal 8).⁴³ Pengajuan PKM pun tampak terlihat lebih sederhana dibandingkan pengajuan PSBB bahkan dengan klausul yang jauh lebih komprehensif. Perkembangan terakhir dilaporkan bahwa terdapat 40 desa/kelurahan yang mengajukan pemberlakuan PKM, dan setengah di antaranya telah disetujui.⁴⁴

Strategi kesehatan masyarakat yang penting lainnya dalam penanganan COVID-19 di provinsi Bali adalah identifikasi secara masif dan sedini mungkin pasien potensial. Bali terbilang relatif beruntung karena memiliki sarana prasarana kesehatan yang relatif ekstensif. Berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan oleh Gubernur Bali kepada Presiden pertengahan bulan lalu, setidaknya Bali telah memiliki 13 rumah sakit rujukan dengan total 392 ruang isolasi, dan 3 laboratorium untuk pengujian *swab*—Rumah Sakit Sanglah, Laboratorium Universitas Udayana, Laboratorium Universitas Warmadewa— dengan total kapasitas 490 spesimen per hari.⁴⁵ Bali bahkan saat ini sedang mempersiapkan kapasitas dua laboratorium tambahan —Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali dan Laboratorium Rumah Sakit Bali Mandara— agar nantinya dapat semakin lebih cepat dalam menguji sampel *swab* COVID-19.⁴⁶ Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi ini yang relatif sedikit, upaya penambahan kapasitas pengujian *swab* merupakan hal yang patut dijadikan pembelajaran oleh daerah lain. Begitu pula komitmen di level provinsi ini kemudian diperkuat dengan inisiatif di tingkat daerah kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Jembrana. Tidak hanya melakukan pelatihan pengambilan *swab* terhadap tenaga medis dari puskesmas,⁴⁷ pemerintah kabupaten ini juga melakukan rekrutmen relawan yang bekerja sebagai tim surveilans COVID-19 dalam melacak kontak dekat dengan orang dalam pemantauan di wilayah tersebut.⁴⁸

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan memang penting, namun hal tersebut belum lengkap apabila tidak didukung dengan perlindungan terhadap garda terdepan. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya sekedar menjamin ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis melainkan juga menjamin kesehatan tenaga non-medis yang berperan signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Sejumlah praktik baik dari Provinsi Bali antara lain adalah kota Denpasar di mana tes cepat dilakukan terhadap pegawai Badan Penyelamatan Nasional (BASARNAS)⁴⁹ dan anggota kepolisian Kawasan Pelabuhan Benoa⁵⁰ yang terlibat dalam operasi pencarian, pertolongan, dan pemulangan pekerja migran.

Kemudian di Kabupaten Gianyar, anggota kepolisian yang bertugas mengamankan tempat karantina di Laboratorium Pertanian Banjar Mas menjalani pemeriksaan kesehatan rutin oleh tenaga kesehatan,⁵¹

⁴³ Lihat Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

⁴⁴ “40 Desa/ Kelurahan Mengajukan PKM, Segini Sudah Disetujui,” Bali Post, 8 Juni 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/06/08/128194/40-Desa-Kelurahan-Mengajukan-PKM,Segini...html>

⁴⁵ “Hadapi COVID-19, Gubernur Bali: Desa Adat untuk Kendalikan Pergerakan Masyarakat,” Sekretariat Kabinet, 12 Mei 2020, <https://setkab.go.id/hadapi-COVID-19-gubernur-bali-desa-adat-untuk-kendalikan-pergerakan-masyarakat/>

⁴⁶ “Segini, Realisasi Refokusing Anggaran Penanganan COVID-19 di Bali,” Bali Post, 10 Juni 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/06/10/128758/Segini,Realisasi-Refokusing-Anggaran-Penanganan...html>

⁴⁷ “Tenaga Kesehatan di Jembrana Dilatih Pengambilan Test *Swab*,” Berita Bali, 19 Mei 2020, <https://www.news.beritabali.com/read/2020/05/19/202005190002/tenaga-kesehatan-di-jembrana-dilatih-pengambilan-test-swab>

⁴⁸ “Tidak Mau Andalkan Pemerintah, Pemkab Jembrana Rekrut Relawan Cegah Corona,” Merdeka, 2 April 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tidak-mau-andalkan-pemerintah-pemkab-jembrana-rekrut-relawan-cegah-corona.html>

⁴⁹ “Puluhan Pegawai Basarnas Jalani Rapid Test, Ini Hasilnya,” Denpasar Post, 18 Mei 2020, <https://www.denpost.id/news/2020/05/18/222354/puluhan-pegawai-basarnas-jalani-rapid-test-ini-hasilnya.html>

⁵⁰ “Puluhan Anggota Polsek i-Rapid Test, Ini Hasilnya,” Bali Post, 23 Mei 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/05/23/124607/Puluhan-Anggota-Polsek-Di-rapid-Test,...html>

⁵¹ “Pengecekan Kesehatan Personel Penjaga Tempat Karantina,” Suara Dewata, 16 April 2020, <https://www.suaradewata.com/read/202004160023/pengecekan-kesehatan-personel-penjaga-tempat-karantina.html>

sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar yang sering melakukan patroli penertiban pedagang di pasar juga mengikuti tes cepat COVID-19.⁵² Lainnya, tercatat bahwa Kabupaten Klungkung melakukan pengujian cepat spesimen COVID-19 terhadap sejumlah polisi adat—*pecalang*,⁵³ sedangkan Kabupaten Badung melakukan uji cepat COVID-19 terhadap petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.⁵⁴ Rangkaian pemeriksaan tersebut setidaknya penting dalam membendung kemungkinan kekurangan personil garda terdepan akibat terinfeksi oleh COVID-19.

Kepemimpinan yang Responsif dan Terkoordinasi

Kepemimpinan yang cukup responsif dan terkoordinasi merupakan alasan penting yang menjelaskan mengapa Bali memiliki strategi kesehatan masyarakat yang bersifat gesit dan kearifan lokal dioptimalkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Responsif dalam hal ini dapat terlihat dari bagaimana langkah-langkah preventif yang diambil Provinsi Bali bahkan terbilang lebih cepat dibandingkan di tingkat nasional. Setidaknya terdapat empat komponen yang relatif menonjol untuk membedakan keduanya sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 1. Pertama, terkait penetapan rumah sakit rujukan. Bali sejak pertengahan Januari 2020 telah berinisiatif untuk menetapkan tiga rumah sakit penanganan COVID-19 di antaranya Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, dan Rumah Sakit Tabanan,⁵⁵ terlepas dari belum adanya kasus dilaporkan. Pemerintah daerah dari dua kabupaten lainnya—Klungkung,⁵⁶ dan Buleleng⁵⁷—juga turut merespons situasi genting ini dengan menyiapkan ruangan isolasi khusus pasien potensial COVID-19, sehingga pada akhir Januari lebih dari setengah kabupaten/kota di Bali dapat dikatakan siaga. Sementara itu, penetapan rumah sakit rujukan secara nasional baru dilakukan per Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-169-2020 beberapa hari setelah kasus pertama di Indonesia diumumkan.

⁵² “250 Satpol PP Non-Reaktif Rapid Test,” Nusa Bali, 27 Mei 2020, <https://www.nusabali.com/berita/74375/250-satpol-pp-non-reaktif-rapid-test>

⁵³ “Kontak Dengan Warga Positif COVID-19, 11 Pecalang Isolasi Mandiri dan Jalani Rapid Test,” Denpasar Post, 4 Juni 2020, <https://www.denpost.id/news/2020/06/04/243127/kontak-dengan-warga-positif-COVID-19-11-pecalang-isolasi-mandiri-dan-jalani-rapid-test.html>

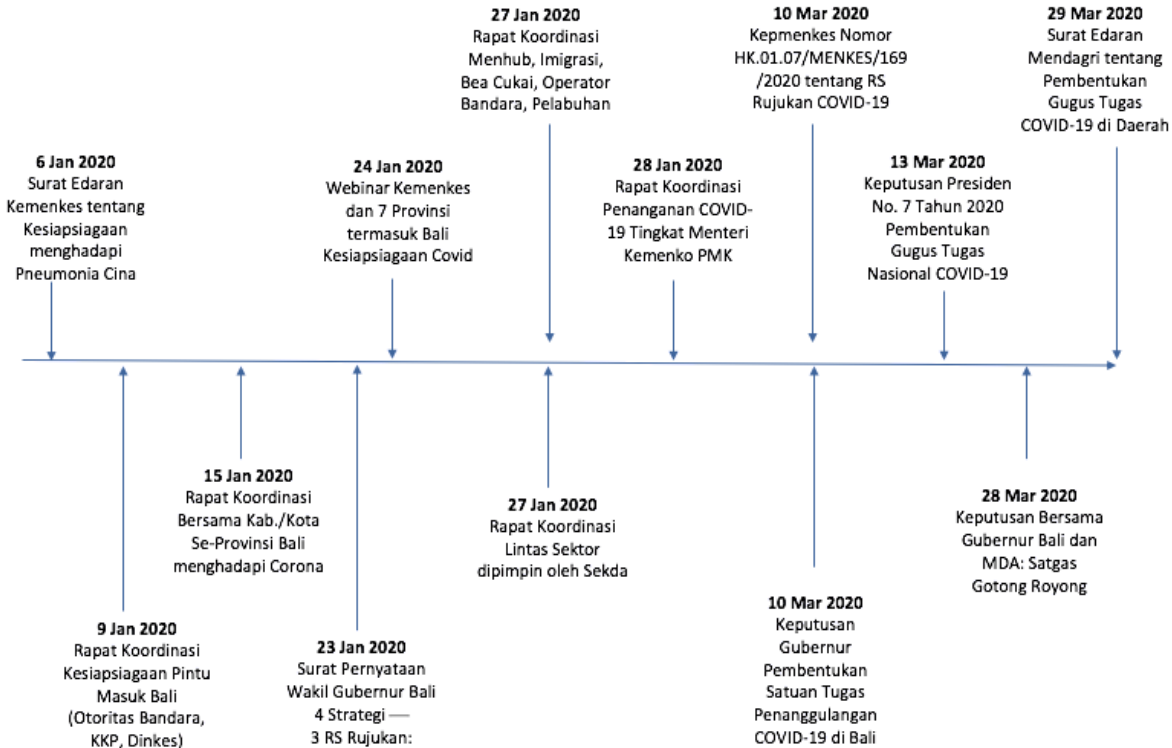
⁵⁴ “461 Petugas Imigrasi Jalani Rapid Test Bertahap,” Nusa Bali, 9 Mei 2020, <https://www.nusabali.com/berita/73418/461-petugas-imigrasi-jalani-rapid-test-bertahap>

⁵⁵ “Pemerintah Keluarkan Surat Pernyataan Resmi,” Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 28 Januari 2020, www.diskes.baliprov.go.id/bali-waspada-virus-corona/

⁵⁶ “Siaga Virus Corona, Pemkab Klungkung Siapkan Ruang Isolasi di Nusa Penida,” JPNN, 29 Januari 2020, <https://www.jpnn.com/news/siaga-virus-corona-pemkab-klungkung-siapkan-ruang-isolasi-di-nusa-penida>

⁵⁷ “Antisipasi Corona, Rumah Sakit Wajib Siapkan Ruang Isolasi,” Koran Buleleng, 26 Januari 2020, <https://koranbuleleng.com/2020/01/26/antisipasi-corona-rumah-sakit-wajib-siapkan-ruang-isolasi/>

Grafik 1.1
Perbedaan Respons Awal Provinsi Bali dan Nasional



Kedua, terkait pengetatan penapisan di pintu masuk. Sejak awal pemberitahuan adanya potensi penyebaran virus di awal Januari, provinsi Bali segera melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan penanganan COVID-19 di antara otoritas bandara, kantor kesehatan pelabuhan beserta dinas kesehatan.⁵⁸ Rapat ini segera ditindaklanjuti satu minggu kemudian dengan penerapan pintu masuk khusus bagi penumpang dari wilayah terjangkit, permintaan pengisian deklarasi kesehatan, serta pemeriksaan tubuh menggunakan *thermal scanner* dan *thermometer infrared* setibanya di bandara I Gusti Ngurah Rai.⁵⁹

Hal ini relatif berbeda dengan penanganan di tingkat nasional yang baru diinisiasi pada pekan terakhir Januari melalui rapat koordinasi pimpinan Menteri Perhubungan, dan turut melibatkan Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Bea Cukai, serta seluruh operator bandara dan pelabuhan.⁶⁰

⁵⁸ “Press Release Virus Corona,” Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 4 Februari 2020, <https://www.diskes.baliprov.go.id/press-release-virus-corona/>

⁵⁹ “Antisipasi Penyebaran Pneumoni Barat, KKP Berlakukan Gate Khusus,” Bali Tribune, 17 Januari 2020, <https://balitribune.co.id/content/antisipasi-penyeban-pneumoni-barat-kpp-berlakukan-gate-khusus>

⁶⁰ “Waspaa Virus Corona, Ini 4 Instruksi Jokowi ke Menhub,” CNBC, 27 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200127111654-4-132923/waspada-virus-corona-ini-4-instruksi-jokowi-ke-menhub>

Ketiga, pembentukan tim khusus penanganan COVID-19. Upaya Bali yang menetapkan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 melalui Keputusan Gubernur Nomor 236/03-B/HK/2020 sangat perlu diapresiasi mengingat partisipasinya yang cukup inklusif.⁶¹ Terdapat beragam pemangku kepentingan mulai dari sektor bisnis (seperti Organisasi Angkutan Darat, Perhimpunan Hotel dan Restoran, Persatuan Pedagang Warung), pendidikan (seperti rektor universitas Udayana, universitas Warmadewa), dan sektor keagamaan (seperti Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia). Keputusan ini terbit lebih cepat beberapa hari dibandingkan dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional yang baru ditetapkan per tanggal 13 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Pada tahapan awal pembentukan pula, keanggotaan gugus tugas nasional masih terbatas pada unsur pemerintahan.

Keempat, konsolidasi penanganan COVID-19 hingga ke tingkat daerah. Provinsi Bali telah melakukan penguatan komunikasi dengan pemerintahan di tingkat kabupaten/ kota sejak awal merebaknya virus ini. Tercatat pada tanggal 15 Januari 2020, pemerintah provinsi mengadakan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota se provinsi Bali tentang kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Setelahnya, sejumlah koordinasi vertikal-horizontal terus dilakukan. Momentum penting yang perlu dicatat yaitu pada tanggal 28 Maret 2020 ketika pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Majelis Adat tentang Satuan Tugas Gotong Royong hingga ke tingkat desa. Hanya membutuhkan waktu kurang dari dua pekan setelahnya, setiap desa adat telah memiliki satuan tugas penanganan COVID-19 di bawah pemantauan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi.⁶² Di sisi lain, penanganan di tingkat nasional belum dapat menunjukkan kecepatan birokrasi sebagaimana praktik baik di Bali. Kementerian Dalam Negeri tercatat baru mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/2622/SJ pada tanggal 29 Maret 2020 yang mensyaratkan setiap daerah untuk membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.⁶³

Selain keempat poin tersebut, responsif dalam penanganan COVID-19 oleh provinsi Bali juga berarti memiliki fokus dan arah tujuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Provinsi Bali setidaknya telah menetapkan minimum tiga indikator penanganan antara lain menahan laju pasien positif, meningkatkan angka kesembuhan, serta menahan laju pasien yang meninggal.⁶⁴ Mengingat pentingnya dilakukan pemeriksaan terhadap warga sebagaimana juga syarat dalam mengadakan perjalanan, maka provinsi Bali secara jelas menunjuk sejumlah fasilitas kesehatan tersebar di seluruh kab/kota yang dinilai mumpuni untuk melakukan tes cepat.⁶⁵ Ketegasan juga tampak dari keputusan Gubernur Bali yang memutuskan akan memberikan sanksi berat kepada kepala perangkat daerah apabila terindikasi salah satu pegawai di unit kerjanya ditemukan reaktif berdasarkan tes *swab*.⁶⁶

Di luar gerak responsif tersebut, Bali hanya relatif kurang cepat dari segi pelaporan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri

⁶¹ “Keputusan Gubernur Bali Nomor 236/03-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali.”

⁶² “Ratusan Desa Adat Sudah Bentuk Satgas COVID-19,” Bali Post, 4 April 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/04/04/113630/700an-Lebih-Desa-Adat-Sudah...html>

⁶³ “Mendagri Keluarkan Surat Edaran Soal Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Daerah,” Kompas, 30 Maret 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11234971/mendagri-keluarkan-surat-edaran-soal-pembentukan-gugus-tugas-penanganan?page=all>

⁶⁴ “Tanpa PSBB, Bali Andalkan Desa Adat Atasi Corona,” CNN, 12 Mei 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512165422-20-502610/tanpa-psbb-bali-andalkan-desad-adat-atasi-corona>

⁶⁵ “Ini, Faskes Ditunjuk Lakukan Rapid Test dan Uji *Swab* Bagi Pelaku Perjalanan,” Bali Post, 22 Mei 2020, <http://www.balipost.com/news/2020/05/22/124454/Ini,Faskes-Ditunjuk-Lakukan-Rapid...html>

⁶⁶ “Gubernur Bali Beri Sanksi Kepala OPD Jika Pegawai Positif COVID-19,” Antara News Sumsel, 1 Juni 2020, https://sumsel.antarane.ws.com/nasional/berita/1528064/gubernur-bali-beri-sanksi-kepala-opd-jika-pegawai-positif-covid-19?utm_source=antarane.ws&utm_medium=nasional&utm_campaign=antarane.ws

per 16 April 2020, tercatat bahwa Bali merupakan satu dari tujuh provinsi yang disebutkan belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi, serta menjadi satu dari empat provinsi yang belum menganggarkan penyediaan jaring pengaman sosial.⁶⁷ Namun demikian, teguran ini segera direspons oleh pemerintah provinsi Bali dengan mengirimkan surat pemberitahuan realokasi anggaran tiga hari setelahnya,⁶⁸ dan realokasi tersebut diumumkan untuk pertama kalinya secara resmi dalam laporan perkembangan kasus COVID-19 oleh gugus tugas daerah pada 23 April 2020.⁶⁹ Kemudian, keputusan ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 pada tanggal 29 April 2020 yang mengatur nilai realokasi anggaran sebesar Rp. 756 milyar —dengan 270 milyar di antaranya untuk penanganan kesehatan, 220 milyar untuk penanganan dampak ekonomi, serta 261 milyar untuk jaring pengaman sosial—.⁷⁰

Kemitraan dalam Mendorong Ketahanan Masyarakat

Kunci penting terakhir dari bagaimana Bali menangani COVID-19 adalah adanya lingkungan kemitraan yang mendorong ketahanan masyarakat setempat. Sinergi antara pemerintah dan perusahaan umum daerah (Perumda) di bidang air minum merupakan salah satu bentuknya. Di Kabupaten Gianyar, Perumda Tirta Sanjiwani sejak April 2020 memutuskan untuk menghapuskan biaya denda, segel, dan penyambungan kembali bagi warga yang terlambat membayar.⁷¹ Kebijakan serupa juga rata-rata turut diterapkan sejumlah daerah —Perumda Tirta Sewakadarma Denpasar,⁷² Perumda Tirta Hita Buleleng,⁷³ Perumda Tirta Mangutama Badung,⁷⁴ Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem,⁷⁵ PDAM Bangli,⁷⁶ selama 3 bulan dengan menysasar masyarakat paling terdampak. Sementara untuk data kebijakan terkait di tiga daerah lainnya—Tabanan, Jembrana, dan Klungkung—belum ditemukan. Tidak begitu pasti apakah kebijakan yang sama dijalankan namun tidak beritakan, atau memang tidak ada.

Tidak hanya Perumda di bidang air minum, sinergi juga terlihat tampak terjadi antara pemerintah daerah dan Perumda di bidang pasar tradisional. Perumda Pasar Sewakadarma Denpasar merupakan salah satu praktik baiknya. Kebijakan yang diambil oleh Perumda pasar ini antara lain adalah memberikan potongan sebesar 50 persen untuk biaya sewa kios dan biaya operasional pasar (BOP),

⁶⁷ “Refocusing dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan COVID-19, Kementerian Dalam Negeri, 16 April 2020, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/17042020-Refocusing-dan-Realokasi-Anggaran.pdf>

⁶⁸ “Disentil Sri Mulyani, Pemprov Bali Anggarkan Rp 756 M Tangani COVID-19,” Radar Bali, 22 April 2020, <https://radarwali.jawapos.com/read/2020/04/22/190241/disentil-sri-mulyani-pemprov-bali-anggarkan-rp-756-m-tangani-COVID-19>

⁶⁹ “Update Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali, Kamis, 23 April 2020,” Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, <https://infocorona.baliprov.go.id/2020/04/23/update-penanggulangan-COVID-19-di-provinsi-bali-kamis-23-april-2020/>

⁷⁰ “Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali,” JDIH Provinsi Bali, 29 April 2020, <https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2020/pergub/2020pergub0051015.pdf>

⁷¹ “Perumda Tirta Sanjiwani Hapus Sanksi Denda Selama Status Darurat,” Suara Dewata, 20 April 2020, <https://www.suaradewata.com/read/202004210002/perumda-tirta-sanjiwani-hapus-sanksi-denda-selama-status-darurat.html>

⁷² “Rai Mantra Perintahkan Perumda Air Minum Gratisan Tagihan,” Bali Express, 10 April 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/10/188246/rai-mantra-perintahkan-perumda-air-minum-gratisan-tagihan>

⁷³ “Perumda Tirta Hita Buleleng Beri Keringanan Tarif Ribuan Pelanggan,” Berita Bali, 4 Juni 2020, <https://www.news.beritabali.com/read/2020/06/04/202006040015/perumda-tirta-hita-buleleng-beri-keringanan-tarif-ribuan-pelanggan>

⁷⁴ “PDAM Gratis Mulai Mei 2020, Perumda Tirta Mangutama Berharap Masyarakat Bijak Gunakan Air,” Bali Tribune, 14 April 2020, <https://balitribune.co.id/content/pdam-gratis-mulai-mei-2020-perumda-tirta-mangutama-berharap-masyarakat-bijak-gunakan-air>

⁷⁵ “Pelanggan Air di Karangasem Digratiskan, Cuma Ada Syarat dan Ketentuan,” Bali Express, 19 April 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/19/189852/pelanggan-air-di-karangasem-digratiskan-cuma-ada-syarat-dan-ketentuan>

⁷⁶ “Air PDAM Bangli Gratis Tiga Bulan untuk Kalangan Tertentu,” Bali Express, 22 Mei 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/22/195561/air-pdam-bangli-gratis-tiga-bulan-untuk-kalangan-tertentu>

serta pembebasan BOP setiap hari minggu.⁷⁷ Perumda turut melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, dan apabila ditemukan pembeli dan pedagang yang tidak menaati peraturannya akan diminta pulang oleh tim pengawas Perumda pasar.⁷⁸

Perumda PD Dharma Santhika di daerah Tabanan juga dapat dijadikan rujukan praktik baik. Salah satunya adalah inisiatif ‘ASN Peduli’⁷⁹ yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyisihkan lima persen tunjangan tambahan penghasilan seluruh aparatur sipil negara setempat untuk membeli paket pangan hasil pertanian dan produk usaha kecil dan menengah (UKM) lokal di Tabanan. Perumda di Tabanan ini juga memainkan peranan aktif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di antaranya dengan melakukan pembinaan terhadap layanan daring dan pesan antar bagi 70 Badan Usaha Milik Desa,⁸⁰ serta mendorong produksi mandiri terhadap alat pelindung diri—baju hazmat, masker, dan pelindung wajah—bagi rumah sakit, puskesmas lokal.⁸¹

Dalam rangka menunjang ketahanan masyarakat di bidang pangan selama COVID-19, tren yang berkembang di Bali juga antara lain adalah pemberian bantuan berupa bibit. Salah satu contohnya dilakukan oleh Dinas Pertanian Buleleng di bawah program ‘Obor Pangan Lestari’ yang telah membagikan gratis 500 bibit cabai dan 500 bibit terong kepada tiga Kelompok Wanita Tani sekitar dan menargetkan pembagian hingga 10 ribu bibit sayuran secara bertahap.⁸²

Program ini sekaligus dimaksudkan untuk memberdayakan kelompok perempuan dalam menghadapi situasi COVID-19. Dinas Pertanian Denpasar juga turut melakukan program pembagian bibit tanaman hortikultura sebanyak 10,000 unit ditambah dengan pendampingan pelatihan bercocok tanam untuk rumah tangga.⁸³

Di samping pemerintah, aktor non-negara pun turut banyak berkontribusi terhadap tren ini. Contoh yang ditemukan antara lain bagaimana Perusahaan Pertamina MOR V Bali yang membagikan 4,000 bibit cabai, terong, dan tomat kepada siswa sekolah dasar dan masyarakat sekitar di Guwang Gianyar,⁸⁴ dan Perusahaan Tirta Investama Aqua Mambal berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa Mandala Sari dan Karang Taruna yang membagikan 15.000 bibit sayur kepada lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat Bongkasa Pertiwi Badung.⁸⁵ Kolaborasi lainnya juga ditunjukkan oleh Aliansi Tanam Saja yang menginisiasi ‘Program Tanam Saja’ dengan membagikan benih sayuran lokal organik ke beberapa kabupaten/kota di Bali,⁸⁶ ataupun Pengusaha Pertanian PT. Bumi Parahyangan Harmoni

⁷⁷ “Perumda Pasar Sewakadarma Berikan Keringanan Biaya Sewa Kios,” Bali Post, 11 April 2020,

<http://www.balipost.com/news/2020/04/11/114868/Perumda-Pasar-Sewakadarma-Berikan-Keringanan...html>

⁷⁸ “Pengunjung Pasar di Denpasar yang tidak Pakai Masker Disuruh Pulang,” Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, 6 April 2020, <http://covid19.denpasarkota.go.id/berita/read/22712>

⁷⁹ “Program ASN Peduli, Serap Hasil Pertanian dan Produk UKM Tabanan,” Denpasar Post, 15 Mei 2020,

<https://www.denpost.id/news/2020/05/15/219470/program-asn-peduli-serap-hasil-pertanian-dan-produk-ukm-tabanan.html>

⁸⁰ “Bumdes Diberdayakan, Layanan Pesan Antar Diterapkan,” Bali Tribune, 18 April 2020,

<https://balitribune.co.id/content/bumdes-diberdayakan-layanan-pesan-antar-diterapkan>

⁸¹ “Perusahaan Daerah Dharma Santika Tabanan Terima Pesanan Faceshield,” Tribun Bali, 17 Mei 2020,

<https://bali.tribunnews.com/2020/05/17/perusahaan-daerah-dharma-santika-tabanan-terima-pesanan-faceshield>

⁸² “Buleleng Mulai Bagikan Ratusan Bibit Cabe dan Terong,” Bali Express, 29 Mei 2020,

<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/29/196403/buleleng-mulai-bagikan-ratusan-bibit-cabe-dan-terong>

⁸³ “Denpasar Siapkan 10.000 Bibit Hortikultura untuk Warga Terdampak Corona, 6 Mei 2020,

<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/06/192651/denpasar-siapkan-10000-bibit-hortikultura-untuk-warga-terdampak-corona>

⁸⁴ “Pandemi COVID-19, Pertamina Peduli Serahkan 4.000 Bibit Tanaman Bangun Ketahanan Masyarakat,” Bali Tribune, 25 Mei

2020, <https://balitribune.co.id/content/pandemi-COVID-19-pertamina-peduli-serahkan-4000-bibit-tanaman-bangun-ketahanan-pangan>

⁸⁵ “Aqua Mambal Serahkan Bantuan COVID-19 Untuk Badung dan Tabanan,” Bali Puspa News, 26 Mei 2020,

<https://www.balipuspanews.com/aqua-mambal-serahkan-bantuan-COVID-19-untuk-badung-dan-tabanan.html>

⁸⁶ “Dukung Ketahanan Pangan di Bali, Aliansi Tanam Saja Berbagi Benih Sayuran,” Kumparan, 29 Mei 2020,

<https://kumparan.com/kanalbali/dukung-ketahanan-pangan-di-bali-alian-s-tanam-saja-berbagi-benih-sayuran-1tVTtUWI3sd/full>

yang juga membagikan bibit jagung, kacang panjang, kangkung ke sejumlah banjar di Gianyar.⁸⁷ Kemitraan seperti ini tentu penting sekali untuk membantu meredam konsekuensi COVID-19 dan meningkatkan ketahanan masyarakat jangka panjang.

Refleksi: menuju normal baru?

Memperhatikan penanganan COVID-19 di Bali saat ini, hal yang perlu dilakukan untuk menuju New Normal saat ini justru terletak pada bagaimana menjaga keempat modalitas tersebut sembari membentuk satu modalitas lainnya yaitu —kebiasaan masyarakat untuk bersikap disiplin terhadap protokol kesehatan. Apabila Bali cukup efektif dalam melewati transisi ini, maka Bali bukan hanya layak menjadi rujukan nasional, namun juga pantas menjadi rujukan kelas internasional untuk penanganan pandemi berikutnya.

Rekomendasi Kebijakan

1. Mengingat angka transmisi lokal saat ini sedang meningkat di Provinsi Bali, **maka:**
 - a. Opsi PKM seperti yang diterapkan di Kota Denpasar dapat dipertimbangkan untuk diperluas ke daerah lain atau bahkan di tingkat provinsi
 - b. Menambah kapasitas tenaga kesehatan puskesmas di kota/kabupaten di luar Denpasar dalam melakukan tes cepat dan pengambilan uji *swab*
 - c. Meningkatkan intensitas inspeksi mendadak dan tes cepat di tempat-tempat berpotensi keramaian termasuk pasar tradisional, restoran,
 - d. Tetap mempersiapkan skenario terburuk apabila jumlah kasus melebihi kapasitas rumah sakit saat ini — termasuk rencana dan lokasi pembangunan rumah sakit darurat
2. Mengingat peran penting desa adat dan pecalang sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, **maka:**
 - a. Tes cepat secara masif terhadap pecalang perlu dilakukan
 - b. Insentif ekonomi bagi pecalang agar dapat dijamin
 - c. Perlu dibuatkan panduan khusus mengenai apa yang perlu dilakukan oleh desa adat dan pecalang dalam tatanan normal baru
 - d. Menerapkan imbalan terhadap desa adat yang berhasil menekan laju penyebaran baik berupa penambahan anggaran penanganan, atau alat tes cepat
3. Mengingat pariwisata normal baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat, **maka:**
 - a. Serupa dengan sertifikasi *'Tsunami-Ready'* yang telah diterapkan oleh Bali saat ini, Bali dapat menginisiasi *'COVID-19 Ready'* yang indikatornya ditetapkan oleh Gugus Tugas Provinsi
 - b. Dinas pariwisata dapat memfasilitasi pelaksanaan tes cepat bagi pelaku industri pariwisata di lapangan penting sebagai syarat kelayakan beroperasi kembalinya
 - c. Melakukan inventarisasi sarana prasarana kesehatan, kebersihan, dan keselamatan di objek-objek wisata sebagai data dasar
 - d. Mendorong dilakukannya simulasi lintas-sektor dalam melakukan evakuasi pengunjung dan transportasi pengunjung yang terduga terinfeksi COVID di objek atau daya tarik wisata

⁸⁷ “Pengusaha Sayuran di Payangan Gratiskan Bibitnya Saat Wabah,” Bali Express, 24 April 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/24/190745/pengusaha-sayuran-di-payangan-gratiskan-bibitnya-saat-wabah-COVID-19>

- e. Mempercepat digitalisasi dalam sektor pariwisata termasuk pengadaan infrastruktur pendukung
4. Mengingat kunci penting penanganan COVID-19 terletak pada komunikasi, maka:
 - a. Laporan perkembangan terbaru di provinsi Bali sekaligus himbauan tatanan normal baru dalam Bahasa Inggris
 - b. Memperkuat dialog rutin antara gugus tugas COVID-19 dan forum relawan
5. Mengingat COVID-19 berdampak secara tidak merata kepada masyarakat, maka:
 - a. Perempuan perlu diberikan ruang semakin banyak dalam perumusan kebijakan penanganan COVID-19 dan tatanan normal baru di provinsi Bali
 - b. Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan termasuk melalui intensifikasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - c. Perlu ada kebijakan afirmatif — penyampaian informasi secara khusus terkait penanganan COVID-19 dan tatanan normal baru kepada masyarakat penyandang disabilitas
 - d. Mempersiapkan tempat, personil penyelamat, dan protokol pengungsian sesuai dengan protokol COVID-19 bagi masyarakat di daerah rawan bencana alam
6. Mengingat COVID-19 berdampak besar pada aktivitas perekonomian lainnya, maka:
 - a. Pelatihan penggunaan transaksi daring serta *business recovery plan* bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara masif perlu digalakkan
 - b. Pengadaan infrastruktur pendukung bagi digitalisasi aktivitas ekonomi perlu dipercepat—perluasan akses internet, keterhubungan dengan *marketplace*
 - c. Kemitraan dengan sektor bisnis, organisasi non-pemerintah, negara lain dalam mengintensifikasi program bantuan yang berkelanjutan perlu didorong
 - d. Persyaratan Bantuan Stimulus Usaha yang diberikan kepada masyarakat terdampak perlu dipermudah sembari meningkatkan transparansi penyalurannya dengan menggandeng lembaga audit dari eksternal
 - e. Data masyarakat terdampak perlu terus diperbaiki secara pro-aktif melalui konfirmasi lapangan

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160

Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id

COVID-19 Commentaries Editors

Philips J. Vermonte, Shafiah Muhibat, Vidhyandika Perkasa, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya